

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini akan memberikan penjelasan mendalam tentang teori-teori yang digunakan, serta referensi pustaka yang digunakan, serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kurva Phillips

Sebelum pandemi, di kalangan ekonom di AS sempat marak terjadi diskusi tentang kurva Philips yang cenderung mendatar (Kuttner & Robinson; 2010). Kurva Philips merupakan hubungan jangka panjang antara inflasi dan pertumbuhan atau antara inflasi dan pengangguran. Semakin tinggi pertumbuhan, makin tinggi inflasi. Alternatifnya, makin rendah pengangguran, makin tinggi inflasi. Perkembangan selanjutnya menunjukkan, hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ini melemah dengan makin rendahnya inflasi tahunan di AS. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa kurva Philips sudah lenyap atau menjadi lebih datar. Artinya, hubungan antara output *gap* dan inflasi makin lemah.

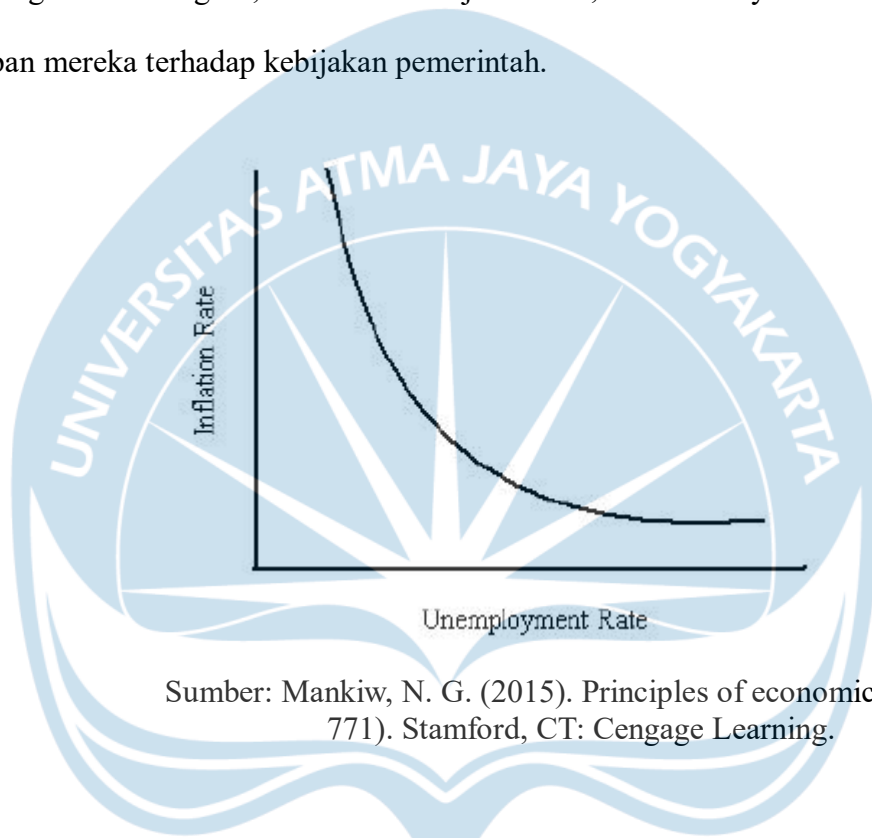
Penyebabnya, kebijakan Bank Sentral AS yang berhasil membuat ekspektasi inflasi jadi stabil melalui *inflation targeting* yang kredibel. The Fed mempunyai mandat melakukan kebijakan moneter yang menjaga *welfare* dari rumah tangga dengan

meminimalkan fluktuasi (standar deviasi) dari output *gap* dan inflasi. Dengan kurva Philips mendatar, tugas *The Fed* sekilas terlihat ringan, hanya menuntun ekspektasi inflasi. Seolah-olah perekonomian jadi imun terhadap guncangan, padahal skala guncangan juga penting diperhatikan. Menurut (Goodhart dan Pradhan; 2019) Faktor lain adalah terjadinya perubahan struktur globalisasi produksi yang membuat deviasi output dari pola normal cepat ditutup dengan makin efisiennya rantai pasokan dunia.

Secara teori, penurunan tingkat pengangguran berarti semakin banyak orang yang bekerja dan menerima penghasilan. Peningkatan pendapatan masyarakat menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa. Kenaikan permintaan tersebut kemudian mendorong naiknya harga-harga di pasar, yang pada akhirnya menyebabkan inflasi. Sebaliknya, jika tingkat pengangguran tinggi, daya beli masyarakat akan menurun sehingga permintaan barang dan jasa menurun, dan tekanan inflasi menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, dalam konteks ini, pemerintah dan bank sentral sering dihadapkan pada dilema antara memilih menurunkan pengangguran atau menjaga kestabilan harga.

Seiring waktu, validitas kurva Phillips mulai dipertanyakan, terutama setelah munculnya fenomena stagflasi pada tahun 1970-an, yaitu kondisi di mana tingkat inflasi dan tingkat pengangguran sama-sama tinggi. Kondisi ini tidak sejalan dengan prediksi kurva Phillips. Sebagai respon atas hal tersebut, para ekonom seperti Milton Friedman dan Edmund Phelps mengembangkan konsep Kurva Phillips yang diperluas

dengan mempertimbangkan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi. Dalam versi ini, dijelaskan bahwa dalam jangka panjang, hubungan antara inflasi dan pengangguran tidak lagi bersifat negatif, melainkan menjadi netral, karena masyarakat menyesuaikan harapan mereka terhadap kebijakan pemerintah.



Sumber: Mankiw, N. G. (2015). Principles of economics (7th ed., p. 771). Stamford, CT: Cengage Learning.

Gambar 1.2 kurva Phillips

A.W Phillips seorang ekonom yang berasal dari London, melakukan pengamatan pada kondisi perekonomian di Inggris terutama mengenai upah pekerja dan tingkat pengangguran Inggris antara tahun. Berdasarkan pengamatan tersebut, Phillip menemukan kenyataan bahwa perubahan tingkat upah akan berbanding terbalik dengan perubahan tingkat pengangguran. Semakin tinggi upah maka pengangguran

menjadi semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah upah, maka pengangguran juga semakin bertambah.

2.1.2 Hukum Okun

Keberhasilan perekonomian negara dapat dilihat dari nilai output, tingkat pengangguran, dan inflasi yang terjadi di negara tersebut. Tiga variabel makro tersebut saling terkait, jika output riil yang dihasilkan suatu negara melebihi output potensial maka dapat menimbulkan inflasi. Pemakaian tenaga kerja lebih dari seperti biasanya dapat mendorong output melebihi output potensialnya. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang tinggi juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menjadi melambat. Hubungan negatif antara kesenjangan output riil dengan output potensial terhadap pengangguran digambarkan oleh *Okun's Law* (Hashmi et al., 2021).

Secara sederhana, Teori Okun menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 persen dalam tingkat pengangguran di atas tingkat pengangguran alamiah akan menyebabkan penurunan PDB riil sekitar 2 persen hingga 3 persen dari potensi maksimum output suatu negara. Hubungan ini dikenal sebagai "*Okun's Law*" atau Hukum Okun, meskipun bukan hukum dalam arti ilmiah yang absolut, melainkan hasil pengamatan empiris yang berlaku dalam kondisi tertentu. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi. Ketika jumlah pengangguran meningkat, berarti semakin sedikit tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi, sehingga output yang dihasilkan oleh perekonomian

akan menurun. Dengan kata lain, peningkatan pengangguran mencerminkan tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia dalam sistem ekonomi, yang berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional.

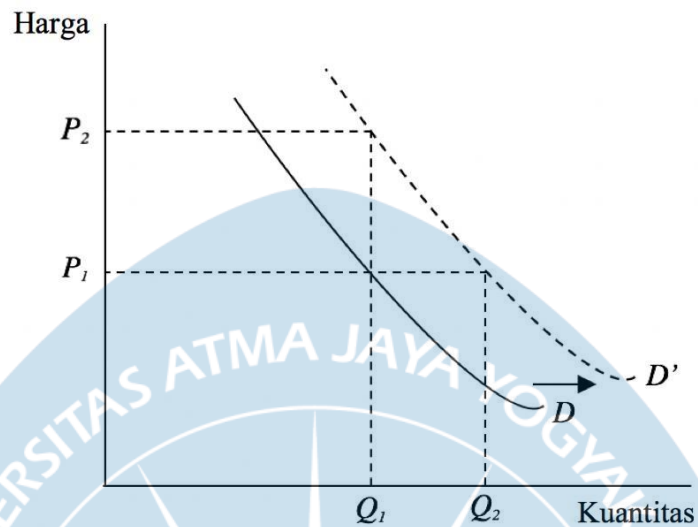
Hubungan yang dijelaskan dalam Teori Okun tidak selalu bersifat tetap, karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti produktivitas tenaga kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, dan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, koefisien dalam hukum Okun—misalnya, pengaruh peningkatan pengangguran terhadap penurunan PDB—dapat berbeda antar negara atau antar periode waktu, tergantung pada struktur ekonomi masing-masing. Di Indonesia, beberapa penelitian menunjukkan bahwa Teori Okun berlaku secara umum, meskipun tidak selalu dengan koefisien yang sama seperti yang ditemukan oleh Arthur Okun di Amerika Serikat. Penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, misalnya pada saat krisis atau pandemi, umumnya diikuti oleh peningkatan angka pengangguran. Hal ini memperkuat pandangan bahwa penciptaan lapangan kerja memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan output ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, Teori Okun memberikan pemahaman yang penting bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, terutama dalam merancang strategi pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dengan mengetahui besarnya dampak perubahan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang tepat dapat dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong investasi, serta mengurangi pengangguran secara berkelanjutan.

2.1.3 Teori Permintaan Tenaga Kerja

Teori permintaan tenaga kerja merupakan bagian dari teori ekonomi tenaga kerja yang menjelaskan bagaimana dan mengapa perusahaan atau pelaku usaha menentukan jumlah tenaga kerja yang akan mereka pekerjakan pada tingkat upah tertentu. Dalam pendekatan mikroekonomi, permintaan terhadap tenaga kerja merupakan permintaan turunan (*derived demand*), yang berarti bahwa permintaan terhadap tenaga kerja tidak muncul secara langsung, melainkan tergantung pada permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut.

Menurut teori ekonomi klasik dan neoklasik, perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja hingga titik di mana nilai produk marginal tenaga kerja (*Value of Marginal Product of Labor/VMP*) sama dengan tingkat upah yang harus dibayar. Artinya, seorang pekerja hanya akan dipekerjakan jika tambahan output yang dihasilkan oleh pekerja tersebut mampu memberikan nilai (dalam bentuk pendapatan atau laba) yang sama atau lebih besar daripada biaya untuk membayar upahnya. Oleh karena itu, kurva permintaan tenaga kerja cenderung menurun (*downward sloping*), karena semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka tambahan output (produktivitas marginal) dari tenaga kerja tambahan tersebut cenderung berkurang.



Sumber : Pindyck & Rubinfeld (2014)

Gambar 1.3 Teori Permintaan Tenaga Kerja

Teori permintaan menjelaskan hubungan antara kuantitas barang yang diminta dengan harga barang tersebut. Kurva permintaan menggambarkan hubungan berapa banyak barang yang dapat dibeli oleh konsumen ketika harga per unit berubah (Pindyck & Rubinfeld, 2014). Gambar di atas menunjukkan bagaimana kuantitas permintaan suatu barang bergantung pada harganya. Variabel lain seperti pendapatan, cuaca, dan harga barang lain juga mampu mempengaruhi kuantitas permintaan. Kurva permintaan berslope negatif, dengan menganggap variabel lain konstan, konsumen akan bersedia mengkonsumsi lebih banyak barang ketika harganya menurun. Ketika harga pasar tetap pada P_1 , diduga terjadi peningkatan kuantitas permintaan dari Q_1 ke Q_2 akibat meningkatnya pendapatan konsumen. Karena peningkatan ini akan terjadi pada harga

pasar berapa pun, pada gilirannya keseluruhan kurva permintaan akan bergeser ke kanan yang ditunjukkan oleh pergeseran dari D ke D'. Dalam hal ini, terjadinya perubahan permintaan merujuk pada pergeseran kurva permintaan. Sedangkan terjadinya perubahan kuantitas permintaan merujuk pada pergerakan di sepanjang kurva permintaan.

2.1.4 Teori Upah

Upah merupakan kompensasi atau balas jasa yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut John Stuart Mill (2000) dalam teori upah menerangkan bahwa tinggi upah tergantung kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja, sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan bagaimana upah ditentukan, baik dari perspektif ekonomi klasik, neoklasik, maupun modern. Berikut adalah beberapa teori upah yang relevan:

1. Teori Upah Subsistensi (*Subsistence Theory*)

Dikemukakan oleh David Ricardo dan Thomas Malthus, teori ini menyatakan bahwa tingkat upah cenderung berada pada tingkat minimum yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup pekerja. Jika upah lebih tinggi dari tingkat subsistensi, maka populasi tenaga kerja akan meningkat dan menekan upah kembali ke tingkat minimum.

2. Teori Upah Pasar (*Market Wage Theory*)

Teori ini menekankan bahwa upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Jika permintaan tenaga kerja meningkat, maka upah akan naik. Sebaliknya, jika penawaran tenaga kerja melebihi permintaan, maka upah akan turun.

3. Teori Upah Marginal *Productivity* (*Produktivitas Marginal*)

Teori ini menyatakan bahwa upah ditentukan oleh kontribusi tambahan (produktivitas marginal) seorang pekerja terhadap total output perusahaan. Pekerja akan dibayar sebesar nilai tambah yang mereka hasilkan. Teori ini umum digunakan dalam ekonomi neoklasik.

4. Teori Upah Efisiensi (*Efficiency Wage Theory*)

Teori ini berpendapat bahwa perusahaan mungkin membayar upah lebih tinggi dari pasar untuk meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi turnover, dan

menarik tenaga kerja berkualitas. Upah lebih tinggi dianggap dapat memotivasi dan meningkatkan loyalitas pekerja.

5. Teori Upah Institusional

Teori ini menekankan bahwa selain faktor ekonomi, faktor institusional seperti kebijakan pemerintah, peran serikat pekerja, peraturan perundang-undangan, dan standar industri turut mempengaruhi pembentukan upah. Upah tidak semata-mata ditentukan oleh pasar bebas, tetapi juga oleh kekuatan lembaga dan regulasi.

2.1.5 Pengertian Upah Minimum

Upah minimum adalah standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai jaminan agar pekerja memperoleh penghasilan yang layak. Hal ini dilakukan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha Suyoto (2000). Pengertian upah minimum menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 7 Tahun 2013 adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah atau gaji pokok (termasuk tunjangan tetap) yang telah ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Tujuan dari pemberlakuan upah minimum adalah untuk melindungi kesejahteraan pekerja, mencegah eksploitasi dalam dunia kerja, dan memastikan bahwa pekerja dapat memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Penetapan upah minimum ini penting dalam upaya menjaga keadilan sosial, memperbaiki standar hidup, serta meningkatkan daya beli masyarakat.

Upah Minimum juga dapat diartikan sebagai suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Upah Minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional, maupun sub sektoral sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8 Tahun 1981. Namun, saat ini hanya upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia (Pratomo & Saputra, 2016).

Melalui upah minimum, pemerintah memastikan bahwa pekerja menerima penghasilan yang layak, meskipun tingkat keterampilan atau pengalaman kerja mereka tidak terlalu tinggi. Penetapan upah minimum ini dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk lokasi geografis, sektor pekerjaan, dan tingkat inflasi. Di Indonesia, Upah Minimum Regional (UMR) yang kini dikenal dengan nama Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan standar upah yang berlaku di setiap daerah. Penetapan upah minimum di masing-masing wilayah ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi di daerah tersebut, seperti biaya hidup, tingkat inflasi, serta kebutuhan hidup layak yang berbeda-beda di setiap wilayah. Pemerintah melalui dinas tenaga kerja di setiap provinsi dan

kabupaten/kota setiap tahunnya menetapkan jumlah nominal upah minimum yang berlaku untuk tahun tersebut.

2.1.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum

Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja (Virginanda, 2013). Berikut merupakan faktor – faktor yang mempengaruhi upah minimum :

1. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Salah satu dasar utama yang digunakan untuk menentukan upah minimum adalah kebutuhan hidup layak. KHL mencakup berbagai aspek, mulai dari makanan, perumahan, transportasi, pendidikan, hingga kesehatan. Pemerintah melakukan survei untuk menentukan besaran KHL yang diperlukan agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

2. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang bersifat umum dalam suatu perekonomian. Penetapan upah minimum harus mempertimbangkan laju inflasi,

karena inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli pekerja. Oleh karena itu, upah minimum harus disesuaikan agar tetap mencerminkan nilai riil yang dapat memenuhi kebutuhan pekerja.

3. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Upah minimum juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara keseluruhan. Dalam situasi ekonomi yang sedang berkembang, ada kemungkinan upah minimum akan meningkat, sementara dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil atau sedang mengalami resesi, kebijakan penetapan upah minimum bisa saja lebih konservatif.

4. Produktivitas Pekerja

Produktivitas kerja, yang mencerminkan seberapa efisien dan efektif pekerja dalam menjalankan tugasnya, juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penetapan upah minimum. Semakin tinggi tingkat produktivitas pekerja, maka semakin besar pula kemungkinan upah minimum untuk dinaikkan, karena pekerja dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap output dan keberhasilan perusahaan.

5. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam mengatur pasar tenaga kerja, pengendalian inflasi, serta perlindungan terhadap kesejahteraan sosial menjadi pertimbangan penting dalam penetapan upah minimum. Pemerintah mengeluarkan kebijakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara kemampuan pengusaha dan kebutuhan hidup pekerja.

6. Tingkat Pengangguran

Angka pengangguran yang tinggi dapat mempengaruhi penetapan upah minimum. Dalam kondisi tingkat pengangguran yang tinggi, pengusaha cenderung memiliki kekuatan lebih dalam menentukan upah karena banyaknya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Namun, dalam kondisi penuh pekerjaan (*low unemployment*), pekerja dapat meminta kenaikan upah.

2.1.7 Tujuan dan Manfaat Upah Minimum

Menurut teori upah efisiensi (*efficiency wage*), upah yang tinggi dapat membuat pekerja lebih produktif. Oleh karena itu, upah dapat digunakan sebagai pendorong produktivitas serta motivasi dan memperkuat hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja (Mankiw, 2007). Penetapan upah minimum memiliki berbagai tujuan dan manfaat, baik untuk pekerja, pengusaha, maupun perekonomian secara keseluruhan, antara lain:

1. Melindungi Kesejahteraan Pekerja

Upah minimum bertujuan untuk memastikan pekerja mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan standar kebutuhan hidup dasar mereka. Kebijakan ini melindungi pekerja dari eksploitasi upah yang sangat rendah yang mungkin diterima dalam pasar tenaga kerja yang tidak diatur.

2. Mengurangi Ketimpangan Sosial

Salah satu tujuan penting dari penetapan upah minimum adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya upah minimum, perbedaan antara pekerja berpendapatan rendah dan tinggi dapat dikendalikan.

3. Meningkatkan Daya Beli

Pekerja yang memperoleh upah minimum yang sesuai dengan standar kehidupan dapat memiliki daya beli yang lebih baik. Ini berkontribusi pada peningkatan konsumsi barang dan jasa di pasar, yang pada gilirannya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.

4. Mendorong Stabilitas Ekonomi

Penetapan upah minimum yang wajar dapat membantu menciptakan kestabilan dalam ekonomi. Dengan adanya pendapatan yang stabil bagi pekerja, konsumen dapat terus membeli barang dan jasa, yang mendukung kelancaran aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

5. Meningkatkan Motivasi dan Produktivitas Pekerja

Ketika pekerja merasa dihargai melalui upah yang layak, hal ini dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas mereka. Pekerja yang tidak khawatir tentang

kecukupan penghasilan cenderung lebih fokus dan berkomitmen terhadap pekerjaannya.

2.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan yang terjadi dalam perekonomian, sehingga menyebabkan produksi barang maupun jasa dalam masyarakat menjadi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui dua pendekatan utama, yaitu teori permintaan dan teori produksi. Menurut teori permintaan, pertumbuhan ekonomi terjadi ketika permintaan agregat meningkat, yang mencakup konsumsi rumah tangga, investasi swasta, belanja pemerintah, dan ekspor bersih. Ketika masyarakat memiliki daya beli dan optimisme terhadap masa depan, mereka akan meningkatkan konsumsi, sehingga mendorong produksi dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, teori produksi menekankan pentingnya sisi penawaran dalam mendorong pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi dalam pendekatan ini bersumber dari akumulasi modal, kemajuan teknologi, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, serta efisiensi produksi. Teori ini beranggapan bahwa jika kapasitas produksi meningkat, maka pendapatan masyarakat akan naik, yang pada akhirnya juga akan mendorong permintaan. Masalah dalam pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Menurut Charysa dalam Prasetyo (2013), istilah pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) secara paling sederhana dapat diartikan

sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu misalkan satu tahun. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diketahui melalui perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDB) suatu wilayah yang dinilai atas dasar harga konstan. Menurut Adelfina & Jember (2016), pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu (PDBt) dengan PDB tahun sebelumnya (PDBt-1). Rumus yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi yaitu:

$$G = \frac{(PDBt - PDBt-1)}{PDBt-1} \times 100\%$$

Keterangan:

- G = laju pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen (%)
- PDBt = Produk Domestik Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun t
- PDBt-1 = Produk Domestik Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun sebelumnya (t -1)

Tingkat pertumbuhan ekonomi adalah suatu perkembangan negara atau daerah yang dapat dilihat dari angka dalam persentase yang memperlihatkan tinggi rendahnya atau cepat lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dalam periode

tertentu dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh ketersediaan faktor-faktor produksi dalam suatu negara. Berdasarkan konsep mikro dalam teori produksi, jumlah output sangat ditentukan oleh input-input yang terlibat dalam proses produksi. Secara umum faktor produksi tersebut dapat berupa sumber daya alam (tanah atau lahan, sinar matahari dan lain-lain). Barang modal (berupa barang, mesin, atau uang).

Menurut Kertiasih dalam Adisasmita (2017), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas produksi untuk menghasilkan pertambahan output, yang umumnya diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat daerah. PDB digunakan sebagai indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi karena (1) PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah, (2) PDB dihitung atas dasar konsep arus barang artinya perhitungan PDB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu, dan (3) batas wilayah perhitungan PDB adalah daerah (perekonomian domestik).

2.3.1 Pengertian Pengangguran

Pengangguran dapat diartikan sebagai orang yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang berlatih untuk karir baru dianggap menganggur. Ketika ada kekurangan pekerja di pasar tenaga kerja, pengangguran terjadi. Negara dan akademisi selalu prihatin tentang hal ini. Karena jumlah orang yang

tinggal di suatu negara meningkat lebih dari jumlah pekerjaan yang tersedia, pengangguran meningkat dan kesenjangan ekonomi terjadi. Ketika pengeluaran agregat dalam perekonomian lebih rendah dari kapasitas komponen produksi ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa, pengangguran dalam perekonomian selalu terjadi (Prasaja, 2013).

Pengangguran dipandang sebagai sumber daya yang terbuang-karena memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan nasional tetapi tidak dapat melakukannya. Tingkat pengangguran di suatu wilayah dapat ditentukan dengan membagi jumlah pengangguran dengan jumlah total pekerja dan menghitung persentase yang dihasilkan. Ini dapat dinyatakan sebagai rumus yang menjadi:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), upah minimum adalah jumlah upah terendah yang secara resmi ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku wajib bagi seluruh perusahaan sebagai standar penghasilan minimum yang harus dibayarkan kepada pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun, dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi pekerja serta menciptakan keadilan dan perlindungan dalam hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha, terutama di wilayah tertentu seperti provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.3.2 Tipe Pengangguran

McEachern (2000) membagi pengangguran menjadi empat kategori: friksional, struktural, musiman, dan siklikal. Kategori ini didasarkan pada sebab atau sumber pengangguran.

1. Pengangguran Struktural (*structural unemployment*)

Pengangguran struktural terjadi ketika ada lowongan dan pengangguran. Ungkapan "pengangguran struktural" menggambarkan pengangguran yang disebabkan oleh ketidakcocokan geografi atau keahlian.

2. Pengangguran Friksional (*frictional unemployment*)

Pengangguran friksional adalah jenis pengangguran yang muncul karena waktu yang diperlukan untuk menyesuaikan antara kualifikasi pekerja dengan pekerjaan yang tersedia. Ini karena pemberi kerja dan pencari kerja membutuhkan waktu untuk berinteraksi dengan pasar tenaga kerja.

3. Pengangguran Musiman (*seasonal unemployment*)

Pekerja dengan pekerjaan musiman menyadari bahwa pekerjaan mungkin langka selama waktu di luar jam sibuk. Kami menyebutnya sebagai pengangguran musiman

4. Pengangguran Siklikal (*cyclical unemployment*)

Pengangguran siklus mengacu pada perubahan pengangguran yang disebabkan oleh siklus bisnis. Banyak perusahaan menurunkan permintaan tenaga kerja dan input lainnya selama resesi ketika produksi turun. Selama resesi, pengangguran siklus meningkat, dan selama ekspansi, menurun.

2.3.3 Dampak Pengangguran

Beberapa efek negatif dari pengangguran dibagi menjadi dua kategori, menurut Sukirno (2000):

A. Efek buruk pada orang dan masyarakat

Stabilitas sosial dalam masyarakat dan kehidupan individu akan dipengaruhi oleh pengangguran. Berikut ini adalah beberapa dampak sosial dari pengangguran:

- 1) Penurunan pendapatan dan standar hidup sebagai akibat dari pengangguran.
- 2) Pengurangan keterampilan mungkin disebabkan oleh pengangguran. Satu-satunya cara untuk mempertahankan keterampilan adalah dengan menggunakannya.
- 3) Ketidakstabilan politik dan sosial dapat diakibatkan oleh pengangguran. Aktivitas ekonomi yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi dapat berkontribusi pada ketidakbahagiaan publik terhadap pemerintahan.

a. Akibat buruk terhadap kegiatan perekonomian

Masyarakat tidak dapat mengembangkan ekonominya dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Memperlihatkan berbagai konsekuensi ekonomi negatif

yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran menunjukkan hal ini. Akibat negatif ini dapat dibagi menjadi dua bagian berikut:

- 1) Masyarakat tidak dapat memaksimalkan potensi kemakmurannya ketika ada pengangguran. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengangguran dapat menghasilkan pendapatan nasional yaitu, pendapatan yang seharusnya di bawah potensi pendapatan. Oleh karena itu, kemakmuran masyarakat akan menurun.
- 2) Penerimaan pajak pemerintah berkurang karena pengangguran; mereka juga berkurang karena rendahnya tingkat aktivitas ekonomi; dan ketika penerimaan pajak rendah, uang untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga menurun, sehingga kegiatan pembangunan juga terus menurun.
- 3) Kemajuan ekonomi tidak dibantu oleh pengangguran. Pengangguran adalah salah satu dari dua efek buruk pada kegiatan sektor swasta. Pertama, kelebihan kapasitas mesin perusahaan menyebabkan pengangguran pekerja; Kedua, penurunan keuntungan yang melambat menyebabkan pengangguran. Karena operasi penghasilan perusahaan yang buruk, hanya ada sedikit motivasi untuk investasi.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu penelitian yang telah dilakukan di masa sebelumnya. Penelitian terdahulu bisa dijadikan acuan atau dasar dalam suatu penelitian dengan objek, tahun, data dan permasalahan yang berbeda. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini antara lain:

Babalola (2019) menganalisis dampak kenaikan upah minimum nasional terhadap tingkat pengangguran dan inflasi di Nigeria. Penelitian ini menggunakan data upah minimum, tingkat pengangguran dan inflasi nasional dari tahun 1980 hingga saat ini, seperti yang dirilis oleh seri Biro Statistik Nasional 2019. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model ARDL kointegrasi dan ECM dengan tingkat pengangguran sebagai variabel dependen dalam model 1 dan tingkat inflasi sebagai variabel dependen dalam model 2. Hasil dari penelitian ini bahwa upah minimum nasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran dan tingkat inflasi baik dalam jangka pendek dan panjang dalam perekonomian Nigeria.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alawi (2021) Penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan, tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Teknik analisis menggunakan metode *software* SPSS.22 dengan alat pengujian analisis data menggunakan analisis jalur. Persamaan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Yang membedakan penelitian ini adalah waktu dan tempat penelitian serta penggunaan metode ARDL (*Autoregressive Distributed Lag*).